



Suar Kemaritiman

Selasa, 7 Agustus 2018



RI – Jepang Setuju Pengelolaan Sampah Jadi Listrik



Menko Maritim Luhut Meninjau GWK, Bali



Menko Maritim Luhut, Tinjau Pelabuhan Benoa

 @kemaritiman

 kemenkobidangmaritim

 @kemenkomaritim

 www.maritim.go.id



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI



Nama Media	Hal	Judul	Berita Ringkasan	Nada
Industry.co.id	1	RI-Jepang Sepakat Pengelolaan Sampah Jadi Listrik	Jakarta-Pemerintah saat ini sangat serius menangani permasalahan sampah yang muncul di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan pemerintah Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyelenggarakan pertemuan kerjasama Indonesia – Jepang dalam pembangunan Fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi di Jakarta, Senin (6/8/2018).	Positif
Viva.co.id	1	Luhut Minta Kepala Daerah Serius Tangani Sampah	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah untuk penanganan sampah padat. Termasuk, di antaranya adalah sampah plastik di kawasan regional, perkotaan, dan destinasi wisata.	Netral



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Menko Luhut ajak kepala daerah tinggalkan warisan kebaikan dalam penanganan sampah

Selasa, 7 Agustus 2018 11:31

Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)



Menko Polhukam kunjungi kantor KLN. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta kepala daerah agar serius menangani masalah sampah di wilayah masing-masing. Penanganan sampah yang baik merupakan salah satu warisan positif yang dapat ditinggalkan saat berakhirnya masa jabatan.

"Saya mohon bapak-bapak Walikota lihat, bapak jadi walikota, bapak punya legacy apa sih? Suatu saat bapak akan berakhir juga kan, sama seperti saya. Setiap orang pasti ingin ada legacy," ungkapnya dalam Rakor Penanganan Sampah, di Hotel Borobudur, [Jakarta](#), Selasa (7/8).

Dia pun meminta segenap Pemerintah Daerah untuk belajar dari keberhasilan penanganan sampah di daerah lain. Dengan demikian upaya menangani sampah dapat menjadi gerakan nasional.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

"Seperti Walikota Banjarmasin, legacy-nya (penanganan) sampah. Coba Anda ke Banjarmasin sekarang. Bisa disiplin masyarakatnya. Semua diatur," tegasnya.

"Kita sadar juga bahwa kalau kita disiplin soal sampah ini, itu mendisiplinkan bangsa ini. Sampah ini musuh bersama, tidak ada suku, bangsa, agama, kaya miskin. Saya challenge bapak-bapak Walikota, ayo kita kerjakan," tandasnya.

<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-ajak-kepala-daerah-tinggalkan-warisan-kebaikan-dalam-penanganan-sampah.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Menko Luhut yakin dampak gempa tak berlangsung lama pada pariwisata Lombok

Selasa, 7 Agustus 2018 11:37

Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)



Luhut Panjaitan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa gempa yang mengguncang Lombok bakal berpengaruh ke sektor pariwisata. Meskipun demikian, dia yakin dampak yang terjadi tak akan besar.

"Ya biasa lah, pasti (berdampak). Untuk sementara ada dampak lah. Paling tidak akan lama, berapa minggu ke depan aja," ungkapnya saat ditemui, di Hotel Borobudur, [Jakarta](#), Selasa (7/8).

Dia meyakinkan berbagai upaya penanggulangan pasca bencana pun terus dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menyiapkan porsi anggaran khusus.

Namun, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu tidak menyampaikan secara rinci berapa besar anggaran yang disiapkan. Sebab, masih dihitung oleh Kementerian Keuangan. "Saya belum tahu (berapa) nanti saya tanya ya," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, penanganan pasca kebakaran di padang Giri Lawa, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pun sudah dilakukan. Insiden yang terjadi di salah satu



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

titik destinasi di Kabupaten Manggarai Barat, Flores itu sudah berhasil ditangani dan tidak bakal mengganggu arus wisatawan.

"Sudah ditangani kemarin. Di mana-mana pasti ada petaka. Yang penting mitigasinya bagaimana," tandasnya.

<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-yakin-dampak-gempa-tak-berlangsung-lama-pada-pariwisata-lombok.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Alinea.id	1

RAPBN 2019 prioritaskan pengembangan SDM

Presiden akan menyampaikan asumsi ekonomi makro dan beberapa pagu indikatif RAPBN 2019 dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018.

Author : [Hermansah](#)

Selasa, 07 Agst 2018 11:59 WIB



Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan pendahuluan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (7/8)./Antara Foto

Presiden Joko Widodo menginginkan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019.

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Presiden Joko Widodo



dalam pembukaan sidang kabinet paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut rencana, Presiden akan menyampaikan asumsi ekonomi makro dan beberapa pagu indikatif RAPBN 2019 dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018.

"Saya harapkan terutama untuk 'vocational school' (sekolah kejuruan), 'vocational training' kemudian kemitraan dengan industri, 'upgrading' di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain. Kalau ada hal yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan," kata Presiden.

Beberapa menteri yang hadir di sidang kabinet itu antara lain Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan para menteri Kabinet Kerja lainnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyetujui kisaran asumsi ekonomi makro yang akan menjadi dasar pembahasan RAPBN 2019.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut, pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, laju inflasi 2,5%-4,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp13.700-Rp14.000 per dollar AS.

Postur makro fiskal 2019 tersebut meliputi pendapatan negara sebesar 12,7%-13,5% dari PDB dan belanja negara 14,2%-15,4% dari PDB.

Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,8%-11,3% dari PDB, penerimaan negara bukan pajak 1,8%-2,1% dari PDB dan hibah 0,05%-0,07% dari PDB.

Untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat ditetapkan 9,3%-10,1% dari PDB, transfer ke daerah dan dana desa 4,9%-5,3% dari PDB, belanja kementerian/lembaga 5,0%-5,6% dari PDB dan belanja non-kementerian/lembaga 4,3%-4,5% dari PDB.

Dengan berbagai proyeksi kisaran tersebut, defisit anggaran 2019 ditetapkan sebesar 1,6%-1,9% terhadap PDB.

Sumber: Antara

<https://www.alinea.id/bisnis/rapbn-2019-prioritaskan-pengembangan-sdm-b1U3U9cXp>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Industry.co.id	1

RI-Jepang Sepakat Pengelolaan Sampah Jadi Listrik

Oleh : Herry Barus | Selasa, 07 Agustus 2018 - 10:20 WIB



INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah saat ini sangat serius menangani permasalahan sampah yang muncul di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Republik Indonesia dan pemerintah Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyelenggarakan pertemuan kerjasama Indonesia – Jepang dalam pembangunan Fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kematriman Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Atara Takebe, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Matafumi Ishii, Kepala LKPP Agus Prabowo, Plt Gubernur Jawa Barat M Iriawan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo. dan para tamu undangan lainnya

Pertemuan ketiga kalinya ini diselenggarakan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur energi asal sampah. Teknologi Pembangkit Listrik asal Sampah (PLTSa) sudah banyak berhasil diterapkan di banyak negara di dunia termasuk Jepang. Bahkan Jepang sendiri



telah membangun PLTSa lebih dari 1000 pembangkit. Hal ini salah satu alasan mengapa Pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Jepang.

Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pertemuan yang ketigaini telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Hal tersebut ditandaikan dengan beberapa dilaksanakannya serangkaian agenda penting dalam acara tersebut.

Adapun rangkaian agenda penting yang telah dilaksanakan dalam acara tersebut adalah :

1. Penyerahan Surat Penugasan Harga Listrik untuk PLTSa Solo dan Surabaya dari Kementerian ESDM kepada PLN;

2. Penandatanganan MoU Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) dengan Kemenko Perekonomian tentang Proyek Legok

Nangka; dan

3. Penyerahan draft PPA Legok Nangka dari PLN kepada Ketua Tim Teknis Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Kami berharap implementasinya dapat dilakukan segera, kalau ada kekurangan atau penyesuaian administratif akan disesuaikan” Kata Ridwan

Ridwan menambahkan, progress proyek PLTSa yang paling maju ada di Provinsi DKI yang ditandai dengan ground breaking di kawasan Sunter pada bulan Mei yang lalu.

“Saat ini yang akan kita kejar untuk Legok Nangka di Jawa Barat” Ridwan menambahkan.

Ridwan tetap optimis proyek ini akan berjalan meskipun waktu menuju ke tahap konstruksi masih cukup membutuhkan waktu. Namun menurutnya kepastian berjalannya proyek ini sudah terlihat.

Sebagai informasi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Proyek PLTSa juga masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Pemerintah juga telah menambah proyek PLTSa di 8 kota menjadi 12 kota dalam Perpres tersebut. Adapun 12 kota yang dimaksud antara lain, DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

<http://www.industry.co.id/read/39726/ri-jepang-sepakat-pengelolaan-sampah-jadi-listrik>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Industry.co.id	1

Presiden Jokowi Ingin Pengembangan SDM Jadi Prioritas

Oleh : Herry Barus | Selasa, 07 Agustus 2018 - 12:00 WIB



INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo menginginkan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2019.

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (7/8/2018)

Menurut rencana, Presiden akan menyampaikan asumsi ekonomi makro dan beberapa pagu indikatif RAPBN 2019 dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018.



"Saya harapkan terutama untuk 'vocational school' (sekolah kejuruan), 'vocational training' kemudian kemitraan dengan industri, 'upgrading' di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain. Kalau ada hal yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan," kata Presiden.

Beberapa menteri yang hadir di sidang kabinet itu antara lain Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan para menteri Kabinet Kerja lainnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR seperti dilansir Anyata telah menyetujui kisaran asumsi ekonomi makro yang akan menjadi dasar pembahasan RAPBN 2019.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut pertumbuhan ekonomi 5,2 persen-5,6 persen, laju inflasi 2,5 persen-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Postur makro fiskal 2019 tersebut meliputi pendapatan negara sebesar 12,7 persen-13,5 persen dari PDB dan belanja negara 14,2 persen-15,4 persen dari PDB.

Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,8 persen-11,3 persen dari PDB, penerimaan negara bukan pajak 1,8 persen-2,1 persen dari PDB dan hibah 0,05 persen-0,07 persen dari PDB.

Untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat ditetapkan 9,3 persen-10,1 persen dari PDB, transfer ke daerah dan dana desa 4,9 persen-5,3 persen dari PDB, belanja kementerian/lembaga 5,0 persen-5,6 persen dari PDB dan belanja non-kementerian/lembaga 4,3 persen-4,5 persen dari PDB.

Dengan berbagai proyeksi kisaran tersebut, defisit anggaran 2019 ditetapkan sebesar 1,6 persen-1,9 persen terhadap PDB.

<http://www.industry.co.id/read/39739/presiden-jokowi-ingin-pengembangan-sdm-jadi-prioritas>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Viva.co.id	1

Pemerintah Janji Perbaiki Kerusakan Akibat Gempa Lombok

[Tim VIVA »](#)

Selasa, 7 Agustus 2018 | 12:01 WIB



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (kanan)

VIVA – Gempa yang mengguncang Lombok dengan magnitudo 7 skala richter, diakui akan berdampak kepada sektor pariwisata dan ekonomi di kawasan tersebut. Alasannya, kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke daerah itu akan menurun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, pun mengakui hal itu akan memengaruhi masuknya devisa ke dalam negeri. Namun, kerugian tersebut dinilai hanya untuk sementara.

"Ya biasa lah, pasti (berdampak). untuk sementara ada dampak lah. (Pengaruh devisa) paling *enggak* akan lama, berapa minggu ke depan aja," kata Luhut, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu pun mengatakan, pemerintah segera melakukan upaya perbaikan kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut.

"Segera, kami perbaiki kerusakan-kerusakannya," katanya.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Luhut juga sempat mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk penanganan gempa tersebut. Namun, alokasi anggaran tersebut masih dihitung oleh Kementerian Keuangan.

"Saya belum tahu (berapa), nanti saya tanya ya," ujarnya.

Sementara itu, Luhut juga mengomentari terkait kebakaran yang disebabkan kawasan Taman Nasional Komodo, di Nusa Tenggara Timur. Hal itu, disebutnya sudah berhasil ditangani dan diakui juga dapat mengganggu wisatawan.

"Sudah ditangani kemarin. Di mana-mana aja pasti ada petaka, yang penting mitigasinya, gimana," ujarnya.

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1062143-pemerintah-janji-perbaiki-kerusakan-akibat-gempa-lombok>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Liputan6.com	1

Ada Gempa, Sektor Wisata Lombok Segera Pulih

Merdeka.com
07 Agu 2018, 12:00 WIB



Beginilah keindahan Gili Trawangan sebelum terjadi gempa Lombok pada Minggu (5/8/2018). (M Husni Mubarrok/ Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui gempa Lombok bakal berpengaruh ke sektor Pariwisata. Meskipun demikian, dia yakin dampak yang terjadi tak akan besar.

"Ya biasalah, pasti (berdampak). Untuk sementara ada dampaklah. Paling tidak akan lama, berapa minggu ke depan saja," ungkapnya saat ditemui, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Berbagai upaya penanggulangan pasca bencana pun terus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Salah satunya dengan menyiapkan porsi anggaran khusus.

Namun, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu tidak menyampaikan secara rinci berapa besar anggaran yang disiapkan. Sebab masih dihitung oleh Kementerian Keuangan.

"Saya belum tahu (berapa) nanti saya tanya ya," ujarnya.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Selain itu, tambah dia, penanganan pasca kebakaran di padang Giri Lawa, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pun sudah dilakukan. Insiden yang terjadi di salah satu spot destinasi di Kabupaten Manggarai Barat, Flores itu, menurut dia sudah berhasil ditangani dan tidak bakal mengganggu arus wisatawan.

"Sudah ditangani kemarin. Di mana-di mana aja pasti ada petaka. Yang penting mitigasinya bagaimana," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: [Merdeka.com](https://www.merdeka.com)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3611981/ada-gempa-sektor-wisata-lombok-segera-pulih>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Menko Luhut soal pencemaran di Sungai Citarum: Saya sangat ngeri jadinya

Selasa, 7 Agustus 2018 12:16

Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)



Menko Polhukam kunjungi kantor KLN. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah dan pencemaran lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang membuat dia miris adalah pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum, Jawa Barat.

"Saya sangat ngeri malah jadinya. Ikan yang di sana sudah heavy poluted. Sudah tidak laik makan. Kalau generasi yang akan datang makan itu, nanti anaknya stunting. Apa kita mau ini," ungkapnya di Hotel Borobudur, [Jakarta](#), Selasa (7/8).

Dia menjelaskan, sebanyak 340.000 ton limbah yang berasal dari 3.400 industri dibuang ke Citarum setiap hari. "Bagaimana tidak rusak? Mati kita kalau begitu," tegas dia.

Dia mengatakan pemerintah tidak akan segan menindak pelaku industri yang terbukti turut berkontribusi pada pencemaran Citarum. "Kita tindak, tapi kita cari equilibrium-nya. Jangan sampai tutup ada lay off lagi karyawannya," ujar mantan Menko Polhukam ini.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Pemerintah, kata dia, amat serius menangani sampah mulai dari bantaran sungai hingga wilayah laut. Sebab, hampir 80 persen sampah laut dibawa oleh aliran sungai.

"Jadi orang bilang kenapa Pak Luhut ngurusin Citarum, memang harus hulu ke hilir, jadi kita bikin satu tim," tegasnya.

<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-soal-pencemaran-di-sungai-citarum-saya-sangat-ngeri-jadinya.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Liputan6.com	1

BPJS Kesehatan Alami Defisit, Pemerintah Siapkan Dana Talangan

Merdeka.com
07 Agu 2018, 13:00 WIB



Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan pada acara Deklarasi Said Aqil Siroj (SAS) Institute di Jakarta, Rabu,(1/8). SAS Institute sebuah organisasi simbol perjuangan gagasan Islam Nusantara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana memberikan dana talangan untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau disebut BPJS Kesehatan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan, saat ini besaran dana talangan yang akan diberikan sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.

"Ya, lagi dihitung dengan baik," ujar dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

"Karena itu juga dulu mungkin kita kurang teliti melihat itu, akhirnya semua di BPJS, jadi bisa bangkrut nanti," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, perlu ada batasan terkait jenis pendanaan atau jaminan yang menjadi tanggung jawab BPJS. Jadi BPJS Kesehatan tidak terlalu terbebani secara keuangan.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Penerima manfaat pun juga mesti diseleksi agar program-program BPJS betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

"Mesti ada batasan koridor yang jelas. Jangan misalnya orang yang mampu masih dihitung," kata dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3612029/bpjs-kesehatan-alami-defisit-pemerintah-siapkan-dana-talangan>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Bisnis.com	1

Gempa Lombok Tak Ganggu Agenda IMF - WB Annual Meeting di Bali

07/8/ 2018
06:13 WIB

Oleh :*Puput Ady Sukarno*



Logo Annual Meeting IMF-World Bank 2018 - kemenkeu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tetap akan melaksanakan agenda International Monetary Fund and the World Bank (IMF - WB) Annual Meetings (AM) 2018 di Nusa Dua Bali, meskipun wilayah tetangganya, yakni di Lombok, Nusa Tenggara Barat terkena bencana gempa bumi 7 skala richter yang menyebabkan sejumlah kerusakan, termasuk di Bali.

Pemerintah tetap akan menggelar pertemuan tahunan ekonomi terbesar tersebut di Nusa Dua, Bali pada Oktober 2018 dan belum berpikir untuk mengganti lokasi acara di tempat yang lainnya.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana IMF WB Annual Meeting 2018 di Bali, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Pullman Hotel Jakarta, Senin (6/8).

"[Gempa Lombok] tidak akan ganggu jadwal acara IMF - WB Annual Meeting di Bali. Tadi saya sudah tanya ke Pak Surono [ahli vulkanologi], gempa di Lombok ini sampai sekarang belum ada dampaknya ke Gunung Agung di Bali," ujarnya.

Pihaknya memastikan bahwa hingga saat ini juga tidak ada kekhawatiran dari negara negara peserta pertemuan atas bencana gempa bumi di NTB itu dapat mengganggu agenda IMF - WB Annual Meeting di Bali Oktober 2018 tersebut.

"Tidak ada kekhawatiran dari negara negara peserta. Jadi tetap Oktober berjalan di Bali. Memang gempa kemarin ada dampak beberapa kerusakan di bandara dan lainnya, termasuk adanya potensi tsunami, tapi kan sudah dicabut peringatan tsunaminya," terangnya.

Pemerintah berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan acara tersebut sebaik mungkin. Bahkan gempa bumi yang telah menelan korban jiwa puluhan orang tersebut juga menjadi perhatian Presiden dan Wakil Presiden.

Katanya Kepala Negara juga telah memerintahkan untuk segera dilakukan penanganan agar warga Nusa Tenggara Barat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan pemerintah pusat juga segera menyiapkan anggarannya.

"Tadi Presiden sampaikan bahwa agar penanganan gempa di Lombok agar ditangani secara cepat. Dan pemerintah pusat juga akan siapkan dananya. Berapa besarnya Bu Sri Mulyani [Menkeu] yang tahu nanti. Kita akan perbaiki secepatnya, karena kaitannya dengan kita juga, termasuk tourisme, dll," ujarnya.

Luhut memastikan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai jadwal dan secara keseluruhan persiapan menyambut IMF-WB Annual Meetings sudah mencapai 85%. "Tinggal pelaksanaan saja semua, semua sudah hampir selesai," ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini pendanaan yang dipakai sudah mencapai Rp566 miliar dari total alokasi dana yang disiapkan sebesar Rp810 miliar.

Editor : Mia Chitra Dinisari

<http://finansial.bisnis.com/read/20180807/9/824719/gempa-lombok-tak-ganggu-agenda-imf-wb-annual-meeting-di-bali>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Beritagar.id	1

Korban jiwa akibat gempa Lombok menjadi 98 orang

[Hedi Novianto](#)

08:01 WIB - Selasa, 07 Agustus 2018



Seorang lelaki mengambil sepeda dari reruntuhan rumahnya yang ambruk dan porak poranda akibat gempa 7 Skala Richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (6/8/2018). | *Zabur Karuru /Antara Foto*

Hingga hari kedua setelah gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (5/8/2018) malam, korban jiwa menjadi 98 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangan resmi pada Senin (6/8) malam menyebutkan korban jiwa masih mungkin bertambah.

Korban jiwa paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara, mencapai 72 orang. Kebetulan wilayah ini memang paling parah terkena dampak gempa yang berpusat di lereng Gunung Rinjani, NTB, pada 8,3 lintang selatan, 116,48 bujur timur Kabupaten Lombok Timur, dengan kedalaman 15 kilometer.



Seluruh korban jiwa disebabkan tertimpa bangunan yang roboh. Dan sejauh ini, korban jiwa adalah warga negara Indonesia dan belum ada laporan warga asing atau wisatawan asing yang menjadi korban jiwa.

Gempa utama yang didahului oleh serangkaian gempa berkekuatan lebih kecil, termasuk 6,4 Skala Richter, pada pekan sebelumnya itu juga membuat 236 orang luka-luka, ribuan rumah rusak, dan ribuan orang mengungsi. Data detail hingga kini masih dicatat oleh pihak berwenang.

Menurut keterangan tertulis Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Senin (6/8) sore, sudah ada 180 gempa susulan sejak gempa utama pada Minggu (5/8). Namun begitu, kekuatan gempa susulan terus melemah--salah satunya berkekuatan 5,4 Skala Richter.

"Dari 147 gempa bumi susulan, masyarakat merasakan 13 gempa," kata Dwikorita.



Gempa utama lalu juga sempat memicu peringatan dini tsunami. BMKG mencatat ada empat tsunami kecil, meski peringatan tersebut langsung berakhir pada Minggu malam. "Masing-masing di Desa Cari setinggi 13,5 cm, Desa Badas 10 cm, Desa Lembar 9 cm dan Benoa 2 cm," Dwikorita menambahkan.

Hingga saat ini; BNPB, Basarnas, TNI, dan kelompok relawan masih terus melakukan evakuasi para korban dari reruntuhan. Sementara BNPB menyatakan sedikitnya 20 ribu korban yang mengungsi ke berbagai posko masih membutuhkan bantuan logistik.

Seperti biasa; bantuan yang dibutuhkan adalah obat-obatan, makanan siap saji, selimut, alas tidur, pembalut, pakaian, tambahan tenda pengungsi, dan layanan *trauma healing* untuk anak-anak.

"Kebutuhan mendesak saat ini adalah tenaga medis, obat-obatan, dan makanan siap saji," tutur Kepala Pusat Data dan Informasi dan Hubungan masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers pada Senin (6/8) seperti dilansir Suara.com.

Di sisi lain, sedikitnya ada 3.000 orang wisatawan--mayoritas dari mancanegara--yang harus dievakuasi dari tiga objek wisata sekitar Lombok; Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Mereka masih menunggu pengiriman kapal angkutan.



Namun, menurut keterangan resmi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Twitter Kemenko Polhukam, Senin (6/8), sudah ada 1.870 wisatawan asing yang sudah dievakuasi hingga Senin siang (14.00 WITA).



Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu M. Faozal pun menjelaskan para wisatawan yang terdampar di tiga gili termaksud sedikit demi sedikit mulai terurai dan dievakuasi melalui tiga pelabuhan di Lombok Utara.

Persoalannya, proses evakuasi juga tak bisa berjalan dengan cepat karena keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan jalur darat evakuasi dari Lombok Utara pun tak sepenuhnya mulus karena sebagian jalan rusak, pecah, dan ada pula jembatan putus.

Dinas Pariwisata NTB pun menyediakan layanan pusat krisis di jalan Langko, Mataram. "Bagi yang ingin tinggal di kota Mataram kami siapkan penginapan gratis, bagi yang ingin melanjutkan perjalanan menuju bandara juga akan kami fasilitasi," ujar Faozal kepada Bisnis.com, Senin (6/8).

<https://beritagar.id/artikel/berita/korban-jiwa-akibat-gempa-lombok-menjadi-98-orang>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Medan.tribunnews.com	1

Desak Pengakuan Hak, Masyarakat Adat Dari Belantara Temui Presiden Jokowi di Istana

Selasa, 7 Agustus 2018 21:04



Perwakilan Masyarakat Adat empat Kabupaten se-Kawasan Danau Toba berkumpul di Sopo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak di Jalan Cornel Simanjuntak, Balige, Tobasa, Selasa (7/8/2018)

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA-Perwakilan masyarakat adat empat Kabupaten se-Kawasan Danau Toba berkumpul di Sopo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak di Jalan Cornel Simanjuntak, Balige, Tobasa, Selasa (7/8/2018).

Mereka kompak menyatukan kekuatan dan akan menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk menindaklanjuti janji pengembalian hak ulayat mereka yang selama ini masuk klaim hutan negara dan konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Mereka merupakan perwakilan dari masyarakat adat empat kabupaten pemilik ulayat adat yang tanahnya diduga diserobot.

Keberangkatan perwakilan itu didampingi AMAN tano Batak yang dikordinir Ketua Badan Pengurus Harian (BPH), Roganda Simanjutak.



Seragam mengenakan ulos pakaian adat Batak, berangkat dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara.

Roganda Simanjutak menjelaskan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Usulan hutan adat 2016 yang pernah mereka ajukan agar segera ditindaklanjuti Pemerintah.

Kata Roganda, pada 2016 lalu ada 11 hutan adat yang diusulkan agar dilepaskan dari klaim hutan negara dan konsesi PT TPL.

Namun, satu dari usulan tersebut sudah dilepas yakni Pandumaan Sipitu Huta, Humbang Hasundutan.

"Sisanya ini harus segera dilepas. Karena sesuai dengan peta yang kami kirim ke Kemenhut sudah fix. Dalam artian sudah melalui proses kroscek dengan Dirjen Planologi Kemenhut untuk segera ditindaklanjuti pelepasannya," sebutnya.

Dijelaskannya, 10 hutan adat lainnya kasusnya serupa yakni klaim hutan negara dan masuk konsesi PT TPL antara lain, Tobasa (Matio, Tukko ni Solu) Taput (Huta Aek Napa, Naga Saribu Siharbankan), Humbang (Huta Sitakkubak hak ulayat Ama Raja Medang Simamora, lalu Simarigung, Pargamanan, Si Onom Hudon Utara, Si Onom Hudon Timur. Sedangkan di Kabupaten Simalungun, Naga Hulambu.

Bersamaan dengan pertemuan dengan Jokowi nantinya disebut Roganda, AMAN tano Batak sekaligus mengusulkan lima usulan baru agar diakui menjadi Ulayat Adat oleh Negara. Antara lain, Hutan adat Sihaporas di Simalungun, lalu Natumikka, Simenak enak, dan Sigalapang dari Kabupaten Tobasa. Serta Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Tor Nauli.

Untuk pertemuan dengan Jokowi, AMAN telah mendapat kabar dari staf protokoler istana terkait penjadwalan pertemuan dengan Presiden.

Dikatakannya, rombongan Masyarakat Adat Sihaporas (Lembaga Adat Lamtoras) juga tengah berangkat melalui Bandara Kualanamu (KNO).

Sementara itu, Gompar Sarumpaet satu dari perwakilan masyarakat adat menuturkan kronologis singkat serta persoalan yang akan dibawakannya ke istana.

Gompar merupakan perwakilan masyarakat adat yang pernah dipenjarakan selama 8 bulan karena mempertahankan tanah leluhurnya yang sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Sejak tahun 1701 hingga saat ini, kata Gompa, silsilah mulai dari leluhurnya masih jelas dan telah berdiam menjaga alam di Adian Baja dan Sigalapang Tobasa.



Namun, pada 1987 Kementerian Kehutanan mulai mengklaim tanah tersebut, menjadi milik Kehutanan Tapanuli Utara, sekaligus mendirikan plank pertanda bahwa tanah tersebut adalah Hutan Suaka, Hutan lindung, dan Hutan konsevasi.

Beberapa keluarga dari keturunan nenek-moyang Gompar yang masih bertahan hingga saat ini memiliki sejarah atau kronologis yang jelas terkait hak ulayat mereka.

Keterangan-keterangan tersebut dibarengi berbagai kenyataan, baik pekuburan, tanaman ladang yang berusia ratusan tahun, tanaman-tanaman keperluan ritual juga masih sangat banyak ditemukan di Sigalapang ini.

"Dari kenyataan inilah kami seluruh keturunan para nenek-moyang kami kembali merebut wilayah adat kami ini. Kami berjuang bersama dengan membentuk suatu kelembagaan kelompok, yang saat ini kami namakan Kelembagaan Tanah Adat Aman Sigalapang," ucapnya.

Saat ini, mereka berjumlah sekitar 150 kepala keluarga, dan luas wilayah adat yang telah mereka petakan berjumlah sekitar 922,08 hektar.

Jumlah itu sudah termasuk berbagai bagian, seperti perumahan, perladangan, tempat tanam padi dan palawija lain, jappalan nihorbo (tempat ternak kerbau) hutan raja, wisata, dan lainnya.

Mendapat Banyak Tantangan

Masyarakat Sigalapang banyak mendapat tantangan, terutama dari pihak kehutanan yang menyatakan bahwa saat ini wilayah Sigalapang adalah konservasi suaka margasatwa.

Tantangan-tantangan yang mereka rasakan langsung, seperti di awal mereka berjuang, segala rumah yang telah kami dirikan, dirobohkan secara paksa oleh pihak kehutanan dibantu Polri dan TNI. Mereka kehilangan dan dibalut kesedihan yang mendalam.

"Banyak anak-anak yang trauma melihat kejadian tersebut hingga sampai saat ini. Banyak kaum ibu yang menangisi kejadian itu, banyak kaum laki-laki yang stres dan ketakutan. Namun kami tidak pernah menyerah dan selalu berjuang. Kami dirikan lagi rumah-rumah tersebut seadanya untuk tempat berteduh dikala panas dan hujan setelah dari ladang," tambahnya.

Dampak dari perlawanan itu, pengurus dari kelembagaan yakni 10 orang, dimasukkan kepenjara selama 8 bulan termasuk Gomoar. Keluarga mereka menderita karena kebutuhan keseharian yang tidak sanggup lagi untuk dibutuhi.

Pasca ditahannya Gompar, keluarga ada yang sakit, dan bahkan berhenti sekolah. Namun setelah kami keluar dari penjara, Gompar dan rekan mulai mendapatkan titik terang tentang Wilayah Adat mereka.

"Kami bekerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan AMAN. Kami dipertemukan dengan Pemkab. Mudah-mudahan, semoga Tuhan dan para arwah Leluhur kami dapat



memberikan pertolongan kepada kami untuk memperjuangkan Wilayah Adat kami ini. Untuk itulah seluruh keturunan leluhur kami sudah menyatukan bulat hidup atau batu untuk mempertahankan Wilayah Adat Aman Sigalapang yang sangat kami cintai ini," tegasnya.

Karenanya, sebut Gompar seiring dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Perda tentang Masyarakat Adat Toba Samosir Pemkab dan DPRD maka bagi Masyarakat Adat Aman Sigalapang adalah moment atau waktu yang sangat tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini seakan tertutupi.

Mereka beranggapan ditetapkannya Perda ini merupakan wujud kepedulian pemerintah, namun harus juga segera direalisasikan.

Penulis: Arjuna Bakkara

Editor: Royandi Hutasoit

Sumber: Tribun Medan

<http://medan.tribunnews.com/2018/08/07/desak-pengakuan-hak-masyarakat-adat-dari-belantara-temui-presiden-jokowi-di-istana?page=all>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Ekonomi.kompas.com	1

Luhut: Pemerintah Diminta Cepat Tangani Gempa Lombok

SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN

Kompas.com - 07/08/2018, 19:29 WIB



Menteri Koordinator Bidang Kematriman Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono saat berkunjung ke redaksi Harian Kompas, Selasa (7/8/2018). Pemimpin redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo turut serta dalam pertemuan tersebut dalam rangka membahas persiapan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kematriman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah dengan cepat melakukan penanganan pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

"(Dampak gempa) Lombok memang cukup parah, tapi penanganannya yang jelas Presiden minta cepat," kata Luhut ketika mengunjungi kantor redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Selasa (7/8/2018). Luhut mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto untuk secara langsung melakukan penanganan pasca gempa Lombok.

Sejumlah kementerian dan lembaga terkait pun telah secara langsung menangani para korban. Luhut menyebut kementerian dan lembaga yang dimaksud antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), TNI, maupun Polri.

Menurut Luhut, prioritas utama saat ini adalah penanganan korban. Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penghitungan bantuan terhadap kerusakan akibat gempa.

"Korban sudah ditangani. Kemudian, akan menghitung kerusakan yang pemerintah bisa bantu. terutama masalah pendidikan dan kesehatan saya kira," ungkap Luhut.

Pemerintah pun telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk segera memitigasi dampak gempa terhadap sektor pariwisata di NTB. Hal ini pun, imbuh Luhut, telah direspon oleh pemerintah.

"Presiden seingat saya sudah perintahkan kami semua untuk mitigasi, karena salah satu penerimaan negara yang bagus pariwisata," tutur Luhut.

Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/07/192921326/luhut-pemerintah-diminta-cepat-tangani-gempa-lombok>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Cerita Luhut pernah disindir anak karena pakai botol plastik

Selasa, 7 Agustus 2018 14:01

Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)



Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kematriman Luhut Binsar Panjaitan mengakui punya kisah menarik selama terlibat secara intensif dalam penanganan sampah plastik. Dia mengaku pernah disindir anaknya soal kebiasaan penggunaan botol plastik di Kementeriannya.

"Seperti anak saya yang perempuan, dia bilang 'Dad kamu itu masih bilang-bilang jangan pakai plastik. Lah di kantormu masih pakai botol plastik'," kisahnya dalam rakor penanganan sampah di Hotel Borobudur, **Jakarta**, Selasa (7/8).

Mendengar kritik dari anak sendiri, Luhut pun sadar, dia harus mulai gerakan lawan sampah plastik dari lingkungan sekitar, terutama di Kementerian tempatnya bekerja.

"Saya pikir benar juga. Saya omong-omong tapi tidak dilaksanakan. Terus di kantor kita saya titip jangan lagi ada botol plastik. Memang leadership, keteladanan itu penting," katanya.

Selain itu, Mantan Menkopolkum ini mengaku tak segan-segan bicara dengan negara yang terbukti 'mengirim' sampah ke Indonesia. Bahkan, dia sempat mendatangi langsung pemerintah Singapura untuk mengadukan sampah plastik asal negeri itu yang masuk ke Laut Indonesia.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

"Jadi banyak sampah kita itu kalau lihat di pulau Nipah di Batam itu sampah Made in Singapura. Hampir semua sampah-sampah hanyut di bawa arus dari Singapura," jelasnya.

Pemerintah Singapura pun sempat mengelak, namun akhirnya menerima setelah ditunjukkan bukti nyata soal sampah asal negerinya. "Jadi tidak boleh ada dunia mengklaim kalau dia sudah itu bersih, bahwa dia kurang berkontribusi laut itu mungkin. Tapi bahwa kita semua terlibat itu yes," imbuh Luhut.

Luhut pun menegaskan penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan membutuhkan kerja sama dengan negara lain juga komitmen negara sendiri. Komitmen sangat diperlukan, terutama Indonesia adalah negara dengan tingkat sampah plastik terparah kedua setelah China.

"Kenapa Indonesia nomor dua? Ada dua penyebabnya, satu karena kita ada pada posisi silang, ada di antara Samudera Pacific ada Samudera Hindia. Kedua karena memang dari kita sendiri," tandasnya. [azz]

<https://www.merdeka.com/uang/cerita-luhut- pernah-disindir-anak-karena-pakai-botol-plastik.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Viva.co.id	1

Luhut Minta Kepala Daerah Serius Tangani Sampah

[Tim VIVA »](#)

Selasa, 7 Agustus 2018 | 14:24 WIB



Pemulung memilah sampah plastik dari tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah untuk penanganan sampah padat. Termasuk, di antaranya adalah sampah plastik di kawasan regional, perkotaan, dan destinasi wisata.

Luhut berpesan kepada kepala daerah, untuk serius menangani persoalan sampah. Sebab, dengan mendisiplinkan penanganan sampah melalui kepala daerah diyakini akan membuat masyarakat atau bangsa semakin disiplin.

"Sampah ini musuh bersama, enggak ada suku, bangsa, agama, kaya, miskin, Saya mohon, bapak-bapak walikota lihat," kata Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Ia mencontohkan, salah satu kota yang cukup baik menangani sampah adalah Banjarmasin. Seluruh masyarakat di situ, disiplin dalam penanganan sampah.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

"Coba Anda ke Banjarmasin sekarang. Bisa disiplin masyarakatnya, semua diatur. Saya *challenge* bapak-bapak walikota, ayo kita kerjakan," ucapnya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman sampah terbesar kedua di dunia setelah China khususnya untuk laut.

"Indonesia ini menghadapi ancaman terbesar, karena Indonesia ini terbesar kedua setelah China, lautnya yang paling parah. China nomor satu, kedua Indonesia," katanya.

Diuraikannya, ada dua penyebab Indonesia bisa menjadi nomor dua di dunia terparah untuk sampah di laut. Pertama, adalah posisi yang Indonesia yang berada di posisi silang antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kedua, adalah karena kebiasaan warganya sendiri.

"Jadi, banyak sampah kita itu kalau lihat di pulau Nipah di Batam, itu sampah itu Made in Singapura. Hampir semua, sampah-sampah hanyut di bawa arus dari Singapura," katanya.

Untuk itu, Luhut menekankan bahwa tidak boleh ada negara di dunia ini yang mengklaim bahwa negaranya tidak berkontribusi sebagai penyumbang sampah.

"Jadi, enggak boleh ada dunia mengklaim kalau negaranya itu bersih, bahwa dia kurang berkontribusi laut itu oleh karena kita itu semua bagi-bagi," ujarnya.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1062220-luhut-minta-kepala-daerah-serius-tangani-sampah>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Menko Luhut ungkap penanganan sampah bantu perbaiki defisit transaksi berjalan RI

Selasa, 7 Agustus 2018 14:59

Reporter : [Wilfridus Setu Embu](#)



Luhut Panjaitan. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan penanganan sampah menjadi satu cara dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia. Maka dari itu, dia meminta pada kepala daerah untuk memperhatikan aspek ini.

"Pariwisata salah satu penerimaan negara yang terbaik untuk mengurangi current account defisit. Jadi kalau bapak-bapak lihat orang surfing, itu sampah semua, ya kita jual pariwisata kita tidak akan laku," ujarnya kepada walikota yang hadir dalam rakor penanganan sampah, di Hotel Borobudur, **Jakarta**, Selasa (7/8).

Cara lainnya ialah dengan menggalakkan penggunaan biodiesel. Pencampuran minyak nabati pada bahan bakar minyak (BBM) dapat mengurangi ketergantungan impor migas Indonesia.

"Sebab kalau ini keluar, kita bisa menerima USD 9 miliar, sehingga current account defisit kita, USD 17,5 miliar tahun lalu bisa dikecilkan dan tekanan kepada Rupiah bisa lebih kurang," jelasnya.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia perlu bergerak dalam pemanfaatan biodiesel dan energi baru terbarukan. Sebab, penggunaan energi fosil saat ini masih sangat dominan.

"Kita tidak boleh hanya tergantung pada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis," ujar Presiden Jokowi.

Dia menambahkan bahwa kalau penggunaan biodiesel dan energi terbarukan itu betul-betul bisa diimplementasikan, maka akan hemat kurang lebih USD 21 juta atau setara Rp 304,9 miliar per hari. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya akan terus mengikuti dan melihat angka-angka implementasi pelaksanaan mandatori biodiesel ini.

<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-ungkap-penanganan-sampah-bantu-perbaiki-defisit-transaksi-berjalan-ri.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Merdeka.com	1

Wapres JK ingatkan BPJS Kesehatan lakukan efisiensi agar tak bangkrut

Selasa, 7 Agustus 2018 17:12

Reporter : [Intan Umbari Prihatin](#)



Wapres JK. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit ini akan ditutup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta BPJS melakukan efisiensi untuk mengatasi defisit.

Efisiensi tersebut menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat, namun tidak mengurangi. Dia juga meminta agar BPJS Kesehatan menjamin pengawasan di setiap rumah sakit.

"Jadi harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu dan pengawasannya lebih baik lagi. Jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi, contohnya, atau pun bakti sosial kemudian masuk BPJS, kalau baksos ya baksos," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (7/8).

Dia menjelaskan terjadinya defisit lantaran selama empat tahun ini BPJS Kesehatan sudah memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah kata JK selalu menjaga tarif agar terjangkau oleh masyarakat.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam mengatasi defisit keuangan, perlu ada batasan terkait jenis pendanaan atau jaminan yang menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar BPJS tidak terlalu terbebani secara keuangan.

Penerima manfaat pun, menurutnya, juga mesti diseleksi agar program-program BPJS betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. "Mesti ada batasan koridor yang jelas. Jangan misalnya orang yang mampu masih dihitung kan," tegasnya saat ditemui di Hotel Borobudur, **Jakarta**, Selasa (7/8).

Dia menambahkan pemerintah pasti akan memberikan dana talangan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan, saat ini besaran dana talangan yang akan diberikan sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. **[idr]**

<https://www.merdeka.com/uang/wapres-jk-ingatkan-bpjs-kesehatan-lakukan-efisiensi-agar-tak-bangkrut.html>



Hari/Tanggal	Sumber Berita	Halaman
Selasa, 7 Agustus 2018	Suara.com	1

Presiden Minta Prioritaskan Pengembangan SDM

Iwan Supriyatna | Dwi Bowo Raharjo

Selasa, 07 Agustus 2018 | 19:20 WIB



Presiden Joko Widodo saat menerima peserta Muktamar IMM XVIII di Malang, Jawa Timur, ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Suara.com - Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019. Sejumlah menteri di kabinet kerja dan kepala lembaga negara pun hadir.

Dalam pengantarnya Jokowi menegaskan, kementerian dan lembaga harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia.

"Saya harapkan terutama untuk vocational school, vocational training, kemudian kemitraan dengan industri, upgrading di ketenagakerjaan kita dan kementerian lain," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Kepala Negara selanjutnya meminta pada kementerian dan lembaga untuk memasukan program yang berkaitan dengan peningkatan SDM ke dalam nota keuangan dan RAPBN.

"Kalau ada hal yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan sumber daya manusia segera dimasukkan," kata Jokowi.



LIPUTAN BERITA KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN

Sejumlah menteri kabinet kerja yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kematriman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

<https://www.suara.com/bisnis/2018/08/07/192045/presiden-minta-prioritaskan-pengembangan-sdm>